

## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Trintje Lambey<sup>1</sup>, Lisbeth Lesawengen<sup>2</sup>, Trilke Tulung<sup>3</sup>

Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: lambeytrintje@unsrat.ac.id

Email: lesawengen@unsrat.ac.id; trilketulung@unsrat.ac.id

### ABSTRACT

The aim of this research is the implementation of E-Government in the management of village finances in the Motoling Timur District, South Minahasa Regency. The development of communication technology has changed the dominant communication paradigm that previously felt one-directional – from the government to the community. The development of communication technology also expands the opportunity for two-way communication, namely between the community and the government and vice versa. This is where the change or transformation occurs in the government's working mechanisms, which are now oriented towards information management and communication strategies. Electronic Government or e-government or e-govt refers to the use of internet networks in disseminating information and providing services from the government to the public. The use of e-government-based applications, especially in villages, has begun to be applied, particularly in the management of village finances, but there are still many issues overshadowing the implementation of such policies. The use of e-government-based applications, especially in villages, has started to be implemented particularly in village financial management. However, there are still many issues overshadowing the implementation of this policy. The research employs a qualitative method through field observation and online data tracking related to the policy of using information technology in government, especially in village financial management. The level of E-Government Implementation: The use of e-government in village financial management in Motoling Timur District shows progress, especially in financial recording, budget transparency, and reporting. However, the level of implementation varies among villages, depending on the readiness of infrastructure and the competence of village officials.

**Keywords:** Implementation, E-Government, Village Finance.

### ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini Adalah Implementasi E-Government Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Motoling Timur Kabupten Minahasa Selatan. Perkembangan tekhnologi komunikasi yang ada telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya terasa berlangsung satu arah – antara pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan tekhnologi komunikasi juga memperluas kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Disinilah terjadi perubahan atau transformasi dalam mekanisme kerja pemerintah yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi. Electronic Government atau e- government atau e-govt merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan aplikasi berbasis e-government terutama di desa sudah mulai diaplikasikan terutama dalam pengelolaan keuangan desa, namun masih banyak permasalahan yang membayangi implementasi kebijakan tersebut. penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui tahapan observasi lapangan, penelusuran data online terkait kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam dunia pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan desa. Adapun Tingkat Implementasi E-Government: Penggunaan e-government dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Motoling Timur menunjukkan kemajuan, terutama dalam pencatatan keuangan, transparansi anggaran, dan pelaporan.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

313

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Namun, tingkat penerapannya bervariasi antar desa, tergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi aparat desa

**Kata kunci:** Implementasi, E-Government, Keuangan Desa.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa diharuskan mengelola keuangan dengan sebaik baiknya khususnya dalam merencanakan APB Desa yang setiap tahunnya perlu disusun oleh pemerintah desa. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan kesejahteraan masyarakatnya dan diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran tersebut agar tercipta akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran atau dana yang telah dilakukan, khususnya berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dihasilkan melalui proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan operasional sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang secara terintegrasi dengan menggunakan fitur-fitur sederhana dan *user friendly* sehingga pengguna mudah mengoperasikannya. Aplikasi Siskeudes bertujuan agar pengelolaan keuangan desa terutama yang bersumber dari dana desa harus dapat dikelola secara bersih dan transparan. Pelaksanaan teknologi informasi bukan merupakan pelaksanaan yang mudah, kendala dapat terjadi pada semua elemen-elemen dan unsur-unsur yang mendukungnya, hal tersebut terjadi pada pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bagian dari *e-government*.

Dalam pelaksanaan penggunaan e-government dalam system keuangan desa di Kecamatan Motoling Timur kabupaten Minahasa Selatan masih memiliki banyak kekurangan dari kesiapan sumberdaya manusia, kesiapan peratalan penunjang serta kebijakan yang belum sepenuhnya menunjang keterlaksanaan e-government di Kabupaten Minahasa Selatan. Urgensi penggunaan teknologi dalam dunia pemerintahan zaman sekarang ini menjadi sebuah keharusan mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang beredar.

Penguatan kapasitas pemerintah desa menjadi sebuah urgensi kontemporer yang harusnya dibijaki dan diperhatikan oleh para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah, kesiapan sumberdaya manusia yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dan ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dengan mudah oleh para actor pelaku kebijakan tersebut.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana informan dalam penelitian ini meliputi pihak pemerintah desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat desa dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Informan dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling Dimana Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil dengan adanya pertimbangan tertentu atau sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 3 teknik yakni Observasi dengan cara pengamatan kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data informasi yang akurat, Wawancara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dan Dokumentasi untuk penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Reduksi data, yaitu kegiatan penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan, Penyajian data, yaitu penulis

mengolah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan Keputusan dan Penarikan kesimpulan, merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang lengkap.

## PEMBAHASAN

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada lingkup bisnis, tetapi pada lingkup sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran teknologi informasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya good governance secara transparansi, akuntabilitas, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, dan berorientasi kepada kesepakatan. Pertumbuhan infrastruktur teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di segala bidang termasuk bidang pelayanan publik dengan melakukan upaya terobosan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi seperti penyediaan jasa akses internet agar desa termasuk dalam Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) yang siap dengan kemampuan internet (desa pintar) guna mengatasi kesenjangan digital yang akan didorong dengan percepatan penyediaan jasa akses internet dari tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan normatif dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 dengan tegas dinyatakan bahwa pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society).

Pemanfaatan teknologi informasi meningkat pesat hingga merambah ke desa-desa. Ketergantungan terhadap teknologi informasi begitu besar sehingga sebuah organisasi tidak dapat eksis dan menjalankan fungsinya tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Menurut Akadun (2009), penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan membuat kinerja organisasi lebih efektif, efisien, dan kompetitif. Bersama dengan hal tersebut, pemerintahan juga memasuki era baru dalam memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital yang dinamakan e-government. E-government membawa dampak dan perubahan terhadap struktur dan fungsi administrasi yang terhubung dengan infrastruktur informasi eksternal yang bersifat digital. Penggunaan teknologi informasi sebagai instrumen baru dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat[3]. Adanya e-government diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi dan meningkatkan transparansi. menyatakan e-government adalah penggunaan teknologi informasi khususnya internet untuk memberikan pelayanan publik yang lebih nyaman, berorientasi pada masyarakat, efektif biaya dan dengan cara yang berbeda dan yang lebih baik. E-government diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintah, baik dari segi akses informasi maupun berkomunikasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, e-government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pada hakekatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan pada setiap elemen-elemen administrasi pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa diharuskan mengelola keuangan dengan sebaik baiknya khususnya dalam merencanakan APB Desa yang setiap tahunnya perlu disusun oleh pemerintah desa. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan kesejahteraan masyarakatnya dan diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran tersebut agar tercipta akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran atau dana yang telah dilakukan, khususnya berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dihasilkan melalui proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan operasional sampai tahap pertanggungjawaban

pengelolaan dan pelaporan keuangan

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang secara terintegrasi dengan menggunakan fitur-fitur sederhana dan user friendly sehingga pengguna mudah mengoperasikannya. Aplikasi Siskeudes bertujuan agar pengelolaan keuangan desa terutama yang bersumber dari dana desa harus dapat dikelola secara bersih dan transparan.

Beberapa desa masih menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi bagian baru dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya bersifat manual seperti desa Rumbia, Kaayuran. Dari perspektif kewenangan, semua desa yang menjadi lokasi penelitian adalah desa yang mengelola keuangan desa atau dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan salah satu teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk diketahui bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan secara transparansi, bersih, efektif dan efisien. Sehingga, tujuan diciptakannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berikut keuntungan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- a) Aplikasi Siskeudes mempromosikan pengelolaan keuangan desa dan dana desa;
  - b) User friendly, membuat aplikasi pemerintah tingkat desa lebih mudah digunakan;
  - c) Didukung oleh petunjuk pelaksanaan dan manual aplikasi;
  - d) Dikembangkan dan dikembangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa (built-in internal control);
  - e) Menjaga kesinambungan, karena ini adalah aplikasi resmi pemerintah;
  - f) Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kementerian Keuangan Kemenkeu) dan SIPEDE milik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- a. penggunaan E-Gov dalam perencanaan melalui sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi desa (SID) di wilayah Kecamatan Motoling Timur Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam penganggaran keuangan desa di mulai dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggotanya demi membahas usulan-usulan berupa masukan dari pihak lingkungan RT atas program pembangunan desa yang kemudian menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengantongi persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan dari penjelasan yang di uraikan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa perencanaan keuangan itu sudah baik karena dalam melakukan perencanaan penganggaran APBDes akan di adakan musyawarah dengan beberapa tokoh dari aparatur desa bersama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang tentang program yang di rencanakan dan akan di biayai oleh desa. Setelah kegiatan perencanaan semuanya telah selesai dilaksanakan melalui musyawarah desa maka setelah pencatatan manual akan dituangkan ke dalam aplikasi sistem keuangan desa seperti data umum desa, visi, misi dan RPJM Desa bisa diinput ke dalam aplikasi siskeudes. Perencanaan melalui aplikasi

siskeudes oleh operator siskeudes dinilai sangat mudah dan efektif juga sangat membantu dan mudah dipertanggungjawabkan dan lebih baik karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terperinci dan tersusun dengan baik. Setelah menggunakan aplikasi siskeudes perencanaan dana desa menjadi lebih baik, tepat waktu dan akurat.

- b. Penggunaan E-Gov dalam pengelolaan keuangan melalui sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi desa (SID) di wilayah Kecamatan Motoling Timur Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh Bendaharawan Desa, perangkat desa beserta masyarakat. Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya Kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

Pengelolaan dilakukan oleh bendahara desa dengan melaksanakan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran juga membuat penutupan buku setiap tanggal akhir bulan secara teratur dan tertib sesuai undang-undang. Bendahara desa mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran menggunakan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah desa, sesuai undang-undang terdapat tiga pembukuan untuk digunakan dalam penatausahaan yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Sistem penatausahaan di desa dilaksanakan langsung saat pelaksanaan. Dalam menjalankan tahap penatausahaan tentunya ada berkas ataupun dokumen yang menjadi bukti fisik dari setiap kegiatan transaksi yang dilaksanakan, oleh sebab itu maka pengarsipan bukti transaksi harus tertata rapi sesuai urutan tanggal transaksi atau biasa kita sebut dengan istilah acrual Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan/ pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes ini, proses penatausahaan baik itu dalam pencatatan penerimaan serta pengeluaran menggunakan sistem manual melalui aplikasi Microsoft Excel yang diisi berdasarkan catatan pelaksana kegiatan yang telah dilakukan. Setelah menggunakan aplikasi siskeudes proses penatausahaan masih diisi berdasarkan catatan pelaksana kegiatan tetapi sudah mengikuti sistem yang terdapat di aplikasi siskeudes, jadi operator hanya perlu mengisi catatan sesuai format. Sistem keuangan desa (Siskeudes) dan Sistem informasi desa merupakan pengaplikasian dari e-gov atau e-government dalam bidang perencanaan dan pengelolaan Keuangan.

- c. Tingkat transparansi keuangan dengan penggunaan E-Gov melalui sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi desa (SID) di wilayah Kecamatan Motoling Timur Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu

oleh Bendaharawan Desa, perangkat desa beserta masyarakat. Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya Kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan/pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa aparat desa sudah mengetahui secara garis besar mengenai gambaran umum aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan penerapan aplikasi tersebut. selain siskeudes terdapat juga sistem informasi desa yang memadai pemerintah desa diharapkan mampu menjadi pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka dan bertanggungjawab. Dalam praktiknya, sistem informasi desa harus dapat dimanfaatkan secara optimal baik untuk keperluan internal yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa maupun untuk keperluan jejaring eksternal dalam rangka memasarkan dan mengembangkan potensi desa secara lebih luas. Oleh karena itu, desa yang tidak hanya dihadapkan pada persoalan pemanfaatan teknologi saja tetapi memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat desa..

## KESIMPULAN

Tingkat Implementasi E-Government: Penggunaan e-government dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Motoling Timur menunjukkan kemajuan, terutama dalam pencatatan keuangan, transparansi anggaran, dan pelaporan. Namun, tingkat penerapannya bervariasi antar desa, tergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi aparat desa. Dampak E-Government: Implementasi e-government membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan desa, meminimalkan kesalahan administratif, serta mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hambatan Implementasi: Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan akses internet di beberapa desa, kurangnya pelatihan bagi aparat desa, serta rendahnya literasi digital sebagian besar pengguna. Selain itu, dukungan teknis dari pemerintah kabupaten belum optimal. Kesadaran Masyarakat: Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan informasi keuangan yang disediakan melalui platform e-government, baik karena keterbatasan akses maupun kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa.

## REFERENSI

- Fatmawati. 2022. Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Electronic Government: Studi Pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung Vol. 2, No. 2, Desember 2022
- Farid Fajrin. 2022. Good Village Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Aplikasi Siskeudes. Islamic Accounting and Finance Review. Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
- Habibullah, Achmad, 2010, Kajian pemanfaatan dan pengembangan Egovernment
- Indrajit, Richardus Eko (2005). E-Government in action. Yogyakarta: Andi Offset.
- The Liang Gie. (2000). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty. Yogyakarta
- Khadafi, R., & Mutiarin, S. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Journal of Governance and Public Policy.
- Lukman, Juwita Pratiwi (2021) Efektivitas E-Government dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu = The Effectiveness of E-Government in Village Financial Management System (SISKEUDES) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
- Scott , W. Richard, 2001, Institutions and Organizations, 2 nd editon,, CA, Thousands Oak, Sage

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

Publication.

Starawaji. (2009). Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

**Penerbit:**  
**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

319

